



## Partners for Resilience (PfR) Indonesia : Sebuah program inovatif dalam peningkatan ketahanan masyarakat rentan bencana

Jakarta, 30/11/2016. Sebuah program inovatif dalam peningkatan ketahanan masyarakat rentan bencana telah diluncurkan di Sultan Hotel, Jakarta. Acara ini dihadiri setidaknya 70 perwakilan dari masyarakat, pemerintah baik pusat atau daerah, DPRD, LSM, akademisi dan sektor swasta.



(Diskusi panel pada saat peluncuran Program PfR / Foto: Yus Rusila N.)

Program **Partners for Resilience Indonesia (PfR Indonesia)** merupakan sebuah program yang digagas oleh aliansi 5 organisasi yang akan bekerjasama dengan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah, dalam mengintegrasikan **Integrated Risk Management (IRM)/ pengelolaan risiko terpadu kedalam kebijakan, praktek investasi dan praktek pembangunan** di Indonesia. Kelima organisasi tersebut antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Research Centre for Climate Change (RCCC), Care International Indonesia, Wetlands International Indonesia dan Karina KWI.

Dalam sambutannya, Kartika Juwita, Koordinator Aliansi PfR Indonesia menyatakan bahwa PfR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan atau menanggulangi bencana, hal ini menjadi penting karena seringkali masyarakat yang terkena bencana terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat ketidakmampuan dan ketidaksiapan mereka untuk menghadapi bencana.



Wetlands  
INTERNATIONAL



Palang  
Merah  
Indonesia

RED CROSS/RED CRESCENT  
CLIMATE CENTRE

International Federation  
of Red Cross and Red Crescent Societies  
The Netherlands + Red Cross

IRM merupakan pendekatan yang memadukan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan pengelolaan serta restorasi ekosistem secara bersamaan. “Saat ini risiko bencana semakin meningkat akibat semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan meningkatnya dampak perubahan iklim, untuk itu pendekatan holistik ini perlu mendapatkan dukungan yang serius dari berbagai pihak supaya bisa diintegrasikan dalam kebijakan dan diterapkan di lapangan baik oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat secara luas” ungkap Nyoman Suryadiputra, direktur Wetlands Internasional Indonesia ketika memimpin sesi panel dalam acara ini. Menanggapi hal tersebut, Setyawati, Kasubdit Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Bappenas, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah berkomitmen mendorong integrasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana dengan pendekatan lingkungan. “Kita sudah punya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Rencana Aksi Nasional pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), hingga diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah, selain itu pengintegrasian bisa dilakukan melalui musrembang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah”, ungkapnya. Menambahkan apa yang disampaikan Setyawati, Budi Wardhana, Deputy 1 Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan bahwa untuk ketangguhan, BRG mengembangkan program desa gambut sejahtera untuk meningkatkan *livelihood* dan daya tahan terhadap bencana, salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pada sumber daya alam setempat.

Dari sisi penanggulangan bencana, Moh Robi Amri, Kasubdit Mitigasi BNPB juga mengungkapkan bahwa saat ini mereka giat meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekitar. “Kita ada Sekolah Sungai, konsepnya dari hulu sampai hilir dan bekerjasama dengan sektor swasta dan *stakeholder* lainnya”. Sementara itu, Bernardi Haryawan, Kepala Seksi Rencana Jangka Menengah Ditjen Cipta Karya Kemenpupera turut menambahkan bahwa terkait dengan infrastruktur dalam pengurangan risiko bencana, Kemenpupera saat ini bekerja di daerah yang kumuh yang berada tidak hanya di perkotaan dan bantaran sungai, namun juga berada di pesisir pantai. “Kita amankan tanggulnya lalu kita relokasi masyarakat dan bangun rumah susun”, pungkasnya.

PfR Indonesia bukanlah hal yang baru. Antara tahun 2011-2015, program ini telah berhasil mengembangkan kegiatan di lapangan yang terbukti tahan terhadap risiko dan sesuai dengan prinsip-prinsip IRM, seperti kegiatan rehabilitasi pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan di Kabupaten Ende dan Sikka, penanaman ubi ungu dan pertanian berkelanjutan di lahan kering di Kabupaten Kupang, NTT. Saat ini babak baru telah dimulai dimana program lanjutan dilakukan untuk mendorong aplikasi IRM yang lebih luas dalam agenda pembangunan di Indonesia, melalui kegiatan advokasi dan dialog kebijakan IRM. Babak baru ini akan difokuskan pada 5 area, antara lain: integrasi dan harmonisasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan PRB kedalam undang-undang Penanggulangan Bencana, integrasi platform internasional (seperti Kerangka Sendai, Paris Agreement dan SDG/Sustainable Development Goal) terkait dengan PRB, API dan restorasi ekosistem kedalam kebijakan nasional dan lokal, pengarusutamaan IRM dalam penggunaan dana pembangunan desa, pengarusutamaan IRM dalam rencana pembangunan ekosistem dataran rendah khususnya ekosistem mangrove dan gambut, dan perencanaan pembangunan terpadu daerah aliran sungai yang juga meliputi permasalahan lintas sektor seperti keterhubungan desa dan kota.

**CP : Susan Lusiana, Project Coordinator PfR-SP, Wetlands International Indonesia**  
T: 081286604246, E: [susan.lusiana@gmail.com](mailto:susan.lusiana@gmail.com)